

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan dan kedudukan pegawai negeri sangat menentukan dalam setiap organisasi pemerintah sebab pegawai negeri itu sendiri merupakan tulang punggung pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Akan tetapi di dalam pelaksanaan dan penyelenggaraannya yang beraneka ragam itu banyak mengalami kendala karena masalah pegawai negeri adalah masalah manusia dengan berbagai macam tingkat kecakapan atau keahlian dan juga sifat-sifatnya.

Bahwa pegawai negeri sipil merupakan aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan kedudukannya sangat menentukan karena berhasil tidaknya tujuan pemerintah tergantung dari pada aparatur negaranya yaitu pegawai negeri.

Dalam zaman modern ini, kemajuan teknologi telah dapat menggantikan sebagian besar tugas-tugas manusia. Pekerjaan dengan ketelitian dan resiko yang tinggi diserahkan pada mesin berteknologi tinggi. Demikian pula dalam hal mengejar produksi yang maksimum. Tanpa mengenal waktu, fungsi mesin-mesin pekerja ini telah menggantikan tenaga manusia. Meskipun demikian faktor manusia tetap merupakan faktor penentu dan pengambil keputusan akhir. Sesuai dengan apa yang dikatakan Arifin Abdulrachman bahwa: "Dalam suatu penyelenggaraan kerja maka manusialah yang menduduki tempat kerja yang vital. Teknik permesinan dapat

ditingkatkan tetapi apabila tidak ada manusia yang menjalankan mesin-mesin maka mesin-mesin itu akan menjadi besi tua dan mati".¹

Sehingga tanpa manusia tujuan akan tetap tinggal tujuan belaka, bahkan dapat dipastikan bahwa organisasi ini sendiripun tidak mungkin ada. Untuk kelancaran jalannya organisasi dalam usaha mencapai tujuan diperlukan adanya manajemen yang baik yaitu semua kegiatan didasarkan atas prinsip efektifitas kerja. prinsip seperti ini akan dapat dijalankan jika tenaga pelaksananya terdiri dari pegawai-pegawai yang memiliki keahlian, kecakapan dan kemampuan kerja yang tinggi dan juga dilandasi dengan rasa pengabdian dan tanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan.

Suatu hal yang mendasar dalam tata laksana pengembangan manajemen dalam meningkatkan prestasi kerja adalah terlaksananya manajemen kantor secara baik, serta terselenggaranya fungsi pimpinan kantor dalam melakukan fungsi pengawasan kantor. Kedudukan manajemen kantor serta pengawasan kantor memberikan suatu konsekuensi bagi terlaksananya pengembangan manajemen yang diarahkan untuk meningkatkan prestasi kerja pegawainya.

Tujuan penyempurnaan pegawai negeri adalah supaya keseJuruhan aparatur pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah benar-benar merupakan aparatur yang berwibawa, kuat, berdaya guna, bersih, penuh kesetiaan, dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah serta diisi oleh tenaga ahli yang mampu menjalankan tugas dalam bidang masing-masing dan hanya niengabdikan diri kepada kepentingan negara dan rakyat.²

¹Arifin Abdulrachman, *Persoalan Manusia Dalam Manajemen*, Majalah Administrasi Negara, LAN, Jakarta, Tanpa Tahun, hal. 23.

²Musane£ *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 2003, hal. 200.